

Mobil Mewah DPRD Dicoret

Kehidupan masyarakat yang semakin sulit tidak menyurutkan DPRD DKI mengurangi perilaku hura-hura dalam penggunaan dana perjalanan dinas.

SELAMAT SARAGIH

DPRD DKI menyelundupkan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk pembelian mobil khusus tamu VIP. Disebut diselundupkan karena Pemerintah Provinsi DKI sama sekali tidak mengajukannya untuk APBD DKI 2011.

Hal itu terungkap kemarin setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret mata anggaran mobil khusus tamu VIP DPRD DKI itu dengan alasan tidak relevan.

Kemendagri memberikan catatan pengadaan mobil khusus tamu VIP DPRD DKI tersebut tidak sesuai prosedur dan menilai belum memerlukan penambahan mobil mewah. Karena itu, anggaran mobil mewah yang dicoret itu akan dialihkan ke dana tak terduga dalam APBD DKI 2011.

Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan berdalih mobil seharga Rp2,5 miliar belum tergolong mewah. "Anggaran diajukan sebesar Rp2,5 miliar, tapi pelaksanaannya tidak sampai segitulah. Ini bukan mobil mewah. Ada gambar Bentley, Lexus, enggaklah," kata Ferrial.

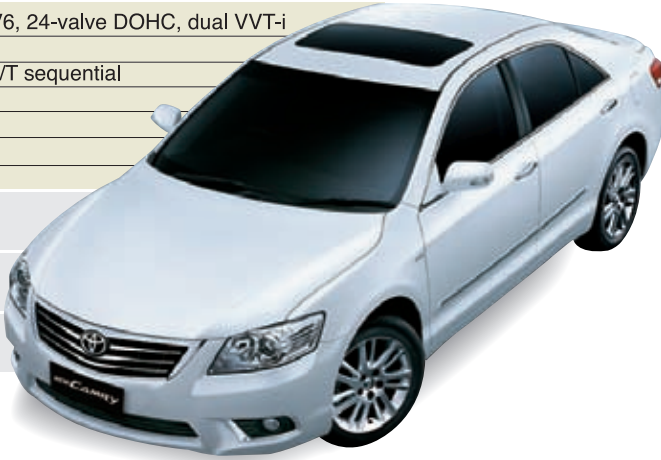
Meski demikian, politikus Partai Demokrat itu tidak keberatan Kemendagri menghapusnya. "Tidak ada masalah. Prosedurnya kan begitu. Setelah disetujui dewan, kemudian diajukan di rapat paripurna, lalu dikoreksi di Kemendagri," lanjut Ferrial seolah-olah eksekutif yang mengajukan. Padahal masuknya anggaran mobil itu 100% akal-akalan dewan.

Toyota Camry 3.5 Q Lux A/T Lux

■ Tipe mesin	: 2GR-FE, V6, 24-valve DOHC, dual VVT-i
■ Sistem penggerak roda	: FWD
■ Transmisi	: 6 speed, A/T sequential
■ Pintu	: 4
■ Tahun produksi	: 2010
■ Negara pembuat	: Jepang
■ Harga*	:

- CAMRY 2400 G AUTOMATIC LUX
Rp457.900.000
- CAMRY 2400 V AUTOMATIC LUX
Rp485.400.000
- CAMRY 3500 Q AUTOMATIC LUX
Rp641.000.000

*Harga on the road



Mercedes-Benz New S 500 L 5.0 A/T 7G-Tronic

■ Tipe transmisi	: 1MD408
■ Pintu	: 4
■ Tipe mesin	: - 3.5L V6 bensin (S 350 L) - 3.0L V6 diesel (S 320 CDI) - V8 bensin (S 500 L) - V6 diesel (S 320 CDI L) - V8 bensin (S 63 AMG)



■ Tahun produksi	: 2009
■ Negara pembuat	: Jerman
■ Harga	:

Rp2.639.000.000

Jenis-jenis mobil yang diajukan DPRD DKI ini dua kali lebih mewah daripada mobil menteri yang sebelumnya diributkan.

Sumber: Riset MI/Foto: oto.com/Mercedes-benz.com/Grafis: Freedy

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Sukri Bey, pengajuan anggaran pembelian mobil VIP tersebut menyalahi prosedur tetap (protap) pengadaan barang.

Protapnya, pengadaan barang untuk kebutuhan kantor

harus diajukan ke BPKD DKI. Kemudian lembaga itu menganalisis perlu tidaknya. Jika disetujui, anggaran pengadaan dimasukkan dalam APBD.

"Begitu protapnya. Sekretaris dewan harus mengajukan permohonan pengadaan mobil VIP itu kepada BPKD sebelum

dimasukkan ke APBD DKI 2011. Namun, mereka sama sekali tidak mengajukan kepada saya," tandas Sukri.

Selain menyalahi prosedur, lanjut Sukri, pengadaan anggaran pembelian mobil khusus tamu belum sesuai kebutuhan. Sebab, tamu khusus DPRD DKI

yang berkunjung ke Jakarta tidak dalam jumlah besar. Jika DPRD menerima tamu dan butuh kendaraan, ia menyarankan menggunakan bus 'Enjoy Jakarta' milik Pemprov DKI.

Perjalanan dinas

Kemendagri juga meminta supaya Pemprov DKI mengedepankan aspek efisiensi dalam anggaran perjalanan dinas. Pos belanja perjalanan dinas harus sesuai dengan Permendagri No 17/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011.

Peringatan itu berkaitan dengan anggaran perjalanan dinas DPRD DKI yang juga superroyal. Misalnya, pada pos kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dimasukkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp2,3 miliar. Kegiatannya sendiri berbiaya Rp3,1 miliar.

Pada pos kegiatan pembahasan badan anggaran, biaya perjalanan dinas anggota dewan mencapai Rp1,3 miliar. Kegiatannya cuma berbiaya Rp200 juta. Kegiatan pembahasan badan musyawarah dianggarkan Rp1,7 miliar dan buat biaya perjalanan dinas sejumlah Rp1,5 miliar.

Lebih gila lagi anggaran perjalanan dinas kegiatan Badan Legislasi Daerah (Balegda) sebesar Rp4,5 miliar dan kunjungan kerja daerah mencapai Rp6,2 miliar.

Menjawab pos hura-hura tersebut, Ketua Balegda DPRD DKI Triwisaksana mengaku tidak keberatan direvisi. (J-1)

selamat@mediaindonesia.com

LINTAS BERITA

Badan Geologi Ambil Alih Sumur Pantau

BADAN Geologi mengambil alih pengelolaan seluruh sumur pantau di Jakarta. Pasalnya, selama dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sumur-sumur tersebut tidak berfungsi dengan baik.

Menurut Sekretaris Badan Geologi Yunus Kusumabrata, tidak berfungsinya sumur pantau membuat pemerintah kekurangan data geologis mengenai kondisi air tanah di Jakarta. Padahal sumur pantau sangat penting untuk mengetahui kedalaman air tanah dan mengendalikan eksploitasi air tanah.

"Mulai tahun ini kami mengambil alih pengelolaan sumur pantau di Jakarta supaya program pemantauan dan pengendalian sumur tanah kembali optimal. Selain itu, kami merencanakan menambah jumlah sumur pantau secara bertahap lengkap dengan perekam otomatis aktivitas air tanah," ujar Yunus di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Di Jakarta terdapat 50-an sumur pantau yang sejak tahun 2000 dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. (AX/J-2)

Penumpang Terjatuh dari Anjungan

SEORANG calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta terjatuh dari anjungan yang ada di terminal I, kemarin dini hari. Korban, Randaputra Ibrahim, 27, tewas seketika di tempat kejadian.

Peristiwa itu terjadi ketika korban sedang menunggu jadwal keberangkatan pesawat Batavia menuju kampung halamannya di Manado. Karena mengantuk, korban tertidur pulas di sisi anjungan tersebut. Korban jatuh terpelanting ke jalan umum di depan terminal C dengan kepala membentur aspal.

Randaputra diketahui baru saja menjenguk orang tua angkatnya di Kampung Parancung, Kecamatan Nanggung, Bogor. Oleh petugas, jenazah dibawa ke RS Usada Insani untuk divisum.

Setelah ada korban, pihak Bandara Soekarno-Hatta baru memberi stiker peringatan bagi para pengunjung atau calon penumpang agar tidak duduk atau tidur di anjungan terminal I C bandara internasional itu. (SM/J-2)

Polisi Gerebek Pabrik Narkoba

APARAT Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek pabrik narkoba di sebuah ruko di Kompleks Duta Square, Petamburan, Jakarta Barat. Berdasarkan pemeriksaan diketahui pelaku merupakan anggota jaringan narkoba dari lembaga pemasyarakatan (LP).

Awalnya polisi menangkap Tjhin Kit Siong alias Asiong, 30, di kawasan Duri Selatan, Jakarta Pusat, karena kedatangan membawa narkoba jenis sabu seberat 0,3 gram. Dari penangkapan tersebut polisi kemudian mengembangkannya dan mengetahui sabu didapat dari pelaku lain yang bernama Syamsiar. Polisi kemudian mengembankan lagi asal barang milik Syamsiar, dan menangkap Ferry Novianto di Kompleks Duta Square. Di lantai tiga ruko polisi menemukan banyak alat pembuatan sabu.

"Asiong yang kedatangan membawa 0,3 gram sabu, kemudian dikembangkan dan akhirnya diungkap *home industry* sabu dengan produksi hingga 5 kg per hari," ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Anjan Pramuka Putra. (FD/J-2)

Kebangkitan Penanganan Kependudukan Mulai Terkuak

Jumlah penduduk yang terlalu banyak bukan hal yang bisa dibanggakan. Apalagi jika banyaknya penduduk itu tanpa kualitas yang memadai.

HASIL sementara Sensus Penduduk 2010 menetapkan jumlah penduduk Indonesia saat ini 237,6 juta jiwa. Artinya jumlah penduduk sudah 3-4 juta jiwa melampaui proyeksi. Apalagi, jumlah penduduk pada 2011 saat ini sudah setara dengan proyeksi jumlah penduduk pada 2013.

Kepala Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sonny Hary Hamardi mengingatkan kenaikan jumlah penduduk yang tidak terkendali berkontribusi negatif pada upaya penurunan angka kemiskinan.

Dari jumlah penduduk saat ini, 13,3% adalah penduduk miskin. Pada 2009-2030 penduduk usia produktif diperkirakan bakal menyentuh angka 70% dari total penduduk. "Mereka membutuhkan lapangan kerja," sebut Sonny.

Namun jika kualitas pendidikan dan keterampilannya rendah, tentunya generasi tersebut akan sulit bersaing dalam era globalisasi. Walhasil, kondisi itu bakal menyulitkan pemerintah untuk secepatnya memutus tali kemiskinan dan pengangguran, yang masih membelenggu Tanah Air.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarif, tingginya jumlah penduduk ini akibat laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,49% per tahun. Angka itu lebih tinggi daripada target pertumbuhan penduduk yang dipatok sebesar 1,30% per tahun. Melonjaknya rata-rata

pertumbuhan penduduk merupakan imbas dari stagnannya program KB sepanjang rentang waktu 2000-2005.

"Masa itu program KB berantakan. Tidak ada satu pun target kerja yang mencapai 100%," paparnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Agar target laju pertumbuhan penduduk menurun menjadi 1,1% pada 2015, pemerintah telah berkomitmen untuk merevitalisasi program KB, yang meliputi intensitas pelayanan dan promosi program KB secara nasional dan penguatan kelembagaan KB di daerah.

Strategi BKKBN yang menerapkan kontrak kerja provinsi (KKP) dengan daerah yang telah berjalan selama tiga tahun mulai membuahkan hasil menggembirakan.

Pada 2009, untuk pertama kalinya dalam sejarah program KB pascareformasi, pencapaian target peserta (akseptor) baru KB melampaui 100%.

Pada 2009, sasaran KKP menetapkan 6,5 juta peserta KB baru. Pada akhir tahun tersebut, pencapaian peserta baru mencapai 7,6 juta akseptor atau naik 118,0%. Capaian di atas 100% juga tercatat pada 2010. Dari 7,7 juta akseptor KB baru yang dibidik, pada tahun tersebut dapat terjaring 8,6 juta peserta baru atau naik sebanyak 111,1%.

Lewat kerja sama dengan TNI/Polri, BKKBN berhasil menekan tingkat peserta KB tidak terlayani (*unmeet need*). Pasalnya, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, perbatasan, pulau terluar, dan

daerah dengan geografi yang sulit telah dapat dijangkau layanan KB personel TNI.

Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merevitalisasi 23.500 klinik KB milik pemerintah dan swasta pun akhirnya mulai terpenuhi.

Sejumlah program lain di BKKBN diklaim Sugiri meningkat dengan rata-rata masing-masing mencapai 20%. Upaya menggeser penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek ke kontrasepsi pelayanan dan promosi program KB secara nasional dan membuahkan hasil.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penggunaan alat kontrasepsi mantap seperti IUD (*intrauterine device*) naik 53%, metode operasi pria (MOP) naik 44%, dan metode operasi wanita (MOW) naik 15%.

"Pergeseran penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang tentu menggembirakan karena risiko gagal KB sangat kecil," imbuhnya.

Menurut Sugiri, penerapan pola KPP sejalan dengan napas otonomi daerah. Pasalnya, dengan strategi itu, daerah dididik untuk memiliki tanggung jawab untuk mengatur permasalahan kependudukannya sendiri.

Pemerintah pusat cukup mengatur persoalan kebijakan strategi kependudukan dan KB, norma standar, dan prosedur terbaik. "Kita juga membuat kriteria keberhasilan program," paparnya.

Pemerintah provinsi diposisikan sebagai pemasar dan penjual program yang telah dibuat pusat ke kabupaten/kota. Provinsi juga diharap-



Dengan semakin banyaknya pelayan KB terlatih, ke depan tidak ada lagi alasan penolakan pelayanan KB Kontap karena bidannya belum terlatih."

Sugiri Syarif

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

kan memberi dukungan dana operasional.

Tugas pusat sejatinya hanya memberikan evaluasi pada tingkat pelaksanaan di kabupaten/kota. "Kalau ada program yang macet di kabupaten/kota, pusat berkeinginan mencari akar permasalahan dan memberikan solusinya," timpalnya.

Lebih optimistis di tahun baru

Pada 2011, BKKBN ingin agar peserta KB dengan metode jangka panjang (MKJP), khususnya IUD, dapat meningkat. Untuk itu, upaya

untuk menyiapkan *provider* pelayanan KB yang memiliki kompetensi, sertifikat, dan dedikasi menjadi syarat mutlak agar keinginan tersebut terpenuhi.

Jumlah *provider* pemberi pelayanan KB yang memiliki kompetensi memang rendah. Hal tersebut tecermin dari hasil kajian rutin BKKBN yang menunjukkan dokter umum yang sempat mengikuti pelatihan teknis pelayanan kontrasepsi KB jenis IUD hanya 27,2% dan jenis kontrasepsi implant hanya 23,8%.

Sementara itu, baru 38,6%

bidan--ujung tombak program KB--yang ikut pelatihan KB IUD. Yang mengikuti pelatihan KB implant tercatat 34,3%.

Pencapaian itu menunjukkan belum semua pemberi layanan KB telah mengikuti pelatihan pemasangan KB MKJP yang telah berstandar. Hal itulah yang menjadi faktor rendahnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang.

Dengan masih sedikitnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang yang risiko kegagalannya lebih rendah, sulit bagi pemerintah untuk menekan laju ledakan penduduk.

Pada saat ini, peserta KB dengan metode kontrasepsi jangka pendek seperti pil, suntik, dan kondom lebih mendominasi jika dibandingkan dengan KB metode jangka panjang.

Untuk meningkatkan kesertaan KB metode jangka panjang, BKKBN telah mendistribusikan IUD *kit* sebanyak 20.618 dan *implant kit* sebanyak 14.948 set untuk mendukung peningkatan peserta KB Kontrasepsi Mantap (KB Kontap).

Selain itu dalam rangka meningkatkan KB Kontap, pada tahun ini BKKBN mengadakan pelatihan IUD dan implan bagi dokter sebanyak 10.343 dan 35 ribu bidan.

"Dengan semakin banyaknya pelayan KB terlatih, ke depan tidak ada lagi alasan penolakan pelayanan KB Kontap karena bidannya belum terlatih," Sugiri menegaskan.

Koordinator Pelatihan Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan (JNPK) Bi-